

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK AKIBAT PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH MUSNAH

Nanda Putri Sulistya^{*}, Khotibul Umam^{}**

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang terjadi terhadap protokol notaris yang telah musnah, serta pelindungan hukum terhadap para pihak akibat protokol notaris yang telah musnah ditinjau dari teori pertanggungjawaban (*liability theory*).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian bahan pustaka, disertai wawancara untuk mendukung bahan pustaka. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang dikaji.

Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa akibat hukum yang terjadi terhadap Protokol Notaris yang telah musnah yaitu akta menjadi tidak dapat diajukan sebagai alat bukti dipersidangan ketika terjadi permasalahan hukum. Dalam hal tidak adanya minuta akta, berarti tidak adanya bukti autentik atau landasan yang kuat dimata hukum. Notaris yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menyimpan dan menjaga minuta akta dan surat-surat dibawah tangan dapat dijatuhi sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (11) UUJNP. Ditinjau dari teori pertanggungjawaban, maka Notaris bertanggungjawab yang didasarkan atas kesalahannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPdata. Pasal 1365 KUHPdata memberikan pelindungan hukum secara represif kepada para pihak ketika terjadi permasalahan hukum.

Kata Kunci : *Notaris, Protokol Notaris, Tanggung Jawab Notaris*

^{*} Bintang Timur, Bintang, Kepulauan Riau

^{**} Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No. 1, Karang Malang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

LEGAL PROTECTION OF THE PARTIES AS A RESULT NOTARY PROTOCOL THAT HAS BEEN DESTROYED

Nanda Putri Sulistya^{*}, Khotibul Umam^{}**

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze the legal consequences that occur to the notary protocol that has been destroyed, as well as legal protection for the parties due to the destroyed notary protocol in terms of liability theory.

The type of research used is normative legal research, namely research on library materials, accompanied by interviews to support library materials. The data were analyzed qualitatively with qualitative descriptive methods, namely describing quality data in the form of regular, coherent, logical, non-overlapping, effective sentences, in order to obtain answers to the legal problems studied.

The results of this legal research show that the legal consequences that occur for the Notary Protocol which has been destroyed, namely the deed cannot be submitted as evidence in court when a legal problem occurs. In the absence of a minuta deed, it means that there is no authentic evidence or a strong foundation in the eyes of the law. Notaries who do not fulfill their obligations in keeping and safeguarding minuta deed and private documents can be subject to sanctions as stated in Article 16 paragraph (11) UUJNP. Judging from the theory of liability, the Notary is responsible based on his mistakes as specified in Article 1365 of the Civil Code. Article 1365 of the Civil Code provides repressive legal protection to parties when a legal dispute occurs.

Keywords: *Notary, Notary Protocol, Notary Responsibilities*

^{*} Bintang Timur, Bintang, Kepulauan Riau

^{**} Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No. 1, Karang Malang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.